

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Talangamin et al, (2019) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu (Muticara, 2019). PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar, masyarakat cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya., sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Yuswara, 2020).

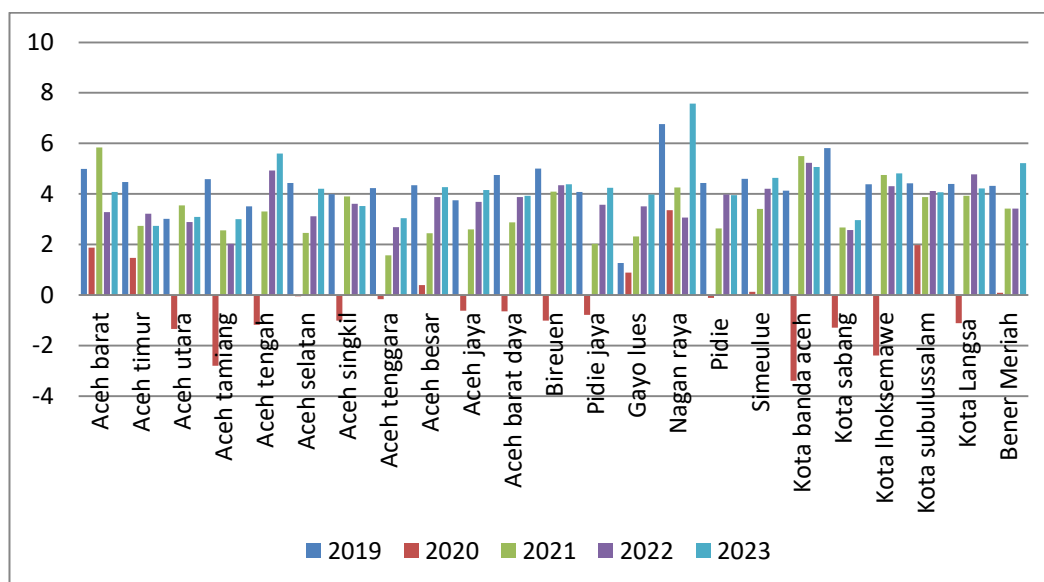
Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang mana pendapatannya masih rendah sehingga pemerintah perlu menitik beratkan prioritas pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di

Indonesia saat ini tidak merata, hal ini terbukti dari besarnya ketimpangan antar daerah di Indonesia yang masih terus terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2019), distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera sebesar 80% dari total PDB Nasional. Hal ini mengindikasikan kurang meratanya pembangunan yang terjadi di Indonesia. Jika ini terus terjadi maka akan mengakibatkan ketimpangan antar daerah yang semakin besar.

Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 Kota. Perbedaan karakteristik dari kabupaten/kota dilihat dari letak geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki, masing-masing wilayah Kabupaten/Kota mempunyai pengaruh yang kuat terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh. Perbedaan karakteristik dari Kabupaten/Kota menyebabkan terjadinya pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam (Rhamedia, 2022).

Alasan pemilihan lokasi Provinsi Aceh sebagai objek penelitian yaitu diketahui kondisi masing-masing daerah di Provinsi Aceh yang berbeda-beda menimbulkan konsekuensi akan adanya kesenjangan kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah pengelolaan sumber-sumber potensi daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Terlebih adanya pandemi covid-19 yang melanda, sehingga peneliti tertarik memilih variabel Pajak Daerah dan Belanja Daerah dalam kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh yang dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Berikut

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2019- 2023:



Sumber : BPS(data diolah), 2024

Gambar 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2019- 2023 (Persen)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa dalam Kabupaten/ Kota di Provinsi banyak terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan ekonominya. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tinggi sampai mencapai tingkat minus dan yang paling tinggi tingkat penurunannya adalah Kabupaten Aceh Tamiang sampai mencapai -2,8%. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian pada tahun 2020. Pandemi ini mengakibatkan menurunnya semua komponen Produk Domestik Bruto (PDB) kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah.

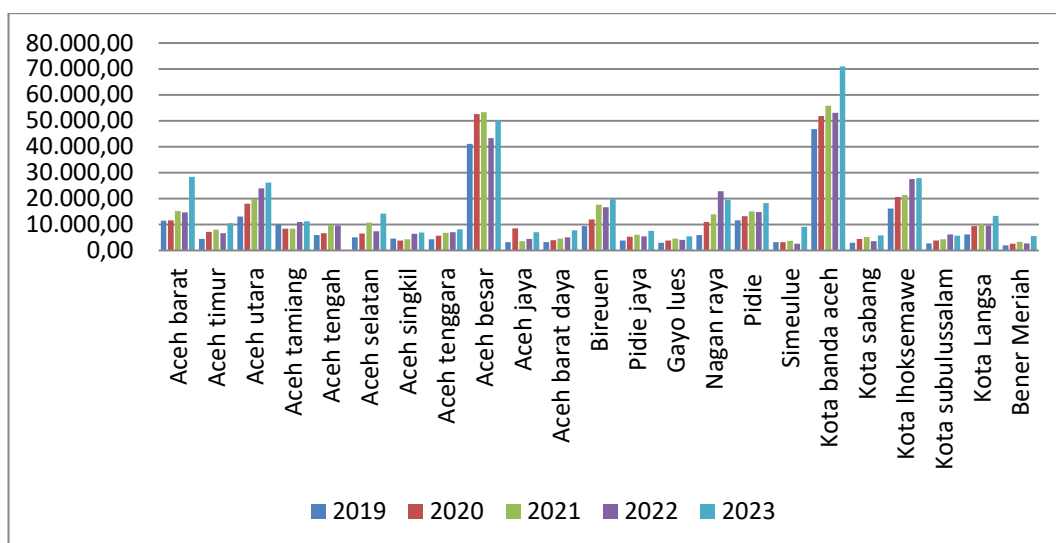
Dengan melihat perkembangan PDRB tersebut, bahwa Provinsi Aceh mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa PDRB tersebut dapat mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila kegiatan ekonomi terus meningkat melalui peningkatan PDRB (Sari, 2018).

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang terdiri dari 18 Kabupaten 5 Kota. Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap PDRB suatu daerah karena memberi kebebasan kepada pemerintah daerah tersebut untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya (Mokoginta et al., 2023). Tingkat PDRB menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. PDRB tidak hanya mengukur tingkat output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan Pendapatan (Miswar et al., 2021).

Pendapatan dapat berupa dana yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Pendapatan daerah tersebut dapat melalui pajak daerah (Made et al., 2020). Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah (Naibaho et al., 2021).

Provinsi Aceh dituntut agar mampu mengalokasikan hasil pajak yang diterima sampai kepada penciptaan masyarakat yang adil, makmur, dan merata seperti Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Mina & Ratna, 2020). Sumber penerimaan pendapatan asli daerah terbesar ialah pajak daerah. Pajak daerah mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan PAD yang dimana menjadi penerimaan yang akan bisa pemerintah lakukan pembangunan daerah. Apalagi pemerintah daerah Provinsi Aceh sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Yang dimana penerimaan pajak daerah menjadi suatu kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Berikut Perkembangan Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2019- 2023:



Sumber : Kemenkeu (data diolah), 2024

Gambar 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2019- 2023 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan pajak hotel serta yang memberikan kontribusi yang

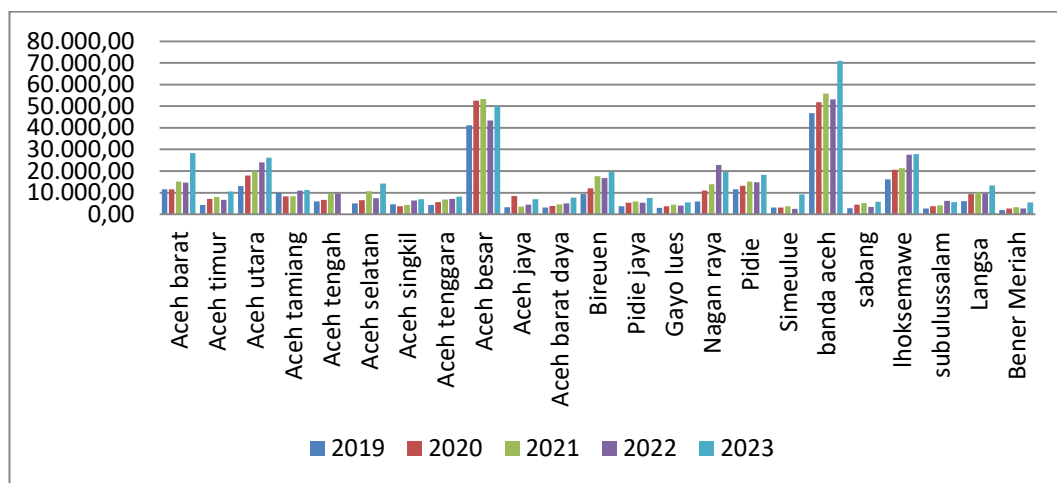
besar terhadap pajak di Provinsi Aceh yaitu pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan pajak meningkat. Jika dikaitkan dengan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023 yang berarti peningkatan Pajak Daerah diikuti oleh pertumbuhan PDRB, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara, (2019) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. berarti Pajak Daerah meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Kemudian tahun 2020 terdapat beberapa Kabupaten/ Kota yang mengalami penurunan, hal ini karena kurang nya penerimaan pajak akibat kondisi pandemi Covid-19 sehingga kurang penerimaan pajak seperti pajak hotel dimana kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh berkurang karena pandemi.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah peran alokatif, dimana pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah (Deswantoro et al., 2017). Belanja Daerah merupakan hal yang tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja. Kualitas APBD adalah bagian dari kinerja pemerintah daerah, karena dapat mencerminkan bagaimana suatu daerah tersebut membelanjakan anggarannya dengan tepat. Belanja Daerah memiliki standar pelayanan minimal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menentukan seberapa besar anggaran yang harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Amanda & Praptoyo, 2023).

Pengalokasian anggaran merupakan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik. Pengalokasian anggaran

merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Rahmitasari & Asyik, 2023).

Pengalokasiannya besar kecil Belanja Daerah di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yang mana apabila faktor tersebut di kelola dengan baik maka akan meningkatkan Belanja Daerah dan apabila Belanja Daerah meningkat maka kebutuhan akan kepentingan daerah juga akan meningkat serta membuat perekonomian menjadi lebih baik (Putri et al, 2021). Berikut data perkembangan belanja daerah Provinsi Aceh Tahun 2019-2023:



Sumber : Kemenkeu (data diolah), 2024

Gambar 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2019- 2023 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan Gambar diatas, diketahui bahwa jumlah Belanja Daerah mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2010-2023 hampir disemua Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya belanja modal dan belanja barang dan jasa di Provinsi Aceh. Jika dikaitkan dengan data

pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh berbanding terbalik, dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Sari, (2018) yang seharusnya secara teori jika belanja daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi menurun juga. Artinya belanja daerah di provinsi Aceh tahun 2019-2023 belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kebijakan efisiensi seiring dengan penurunan realisasi pendapatan daerah serta banyaknya pertanggungjawaban belanja yang belum direalisasikan.

Berdasarkan pemilihan variabel-variabel penelitian diatas yaitu Pajak Daerah, dan Belanja Daerah di Provinsi Aceh diharapkan pemerintah dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh (Islami & Nababan, 2020).

Sejauh ini telah banyak yang meneliti mengenai pertumbuhan ekonomi atau dilihat dari PDRB yang berkaitan dengan pajak daerah dan belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Mutiar, 2019) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap PDRB dan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) dengan hasil penelitian bahwa Belanja Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juwari et al., (2019) menunjukkan bahwa pajak daerah yang berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah pada kabupaten/kota di wilayah Kalimantan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sunarto & Sunyoto (2019) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian Sumual (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

2. Mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui pengaruh pajak daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai bagaimana Pengaruh pajak daerah dan belanja daerah terutama pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah, memperdalam teori karena penulisan ini dilakukan dari sumber referensi terpercaya dan dapat berguna untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan fakultas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang di harapkan dalam hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi dan acuan peneliti selanjutnya, yang ingin mengembangkan penelitian di bidang pengaruh pajak daerah dan belanja daerah.

2. Penelitian ini bersifat kuantitatif berupa angka dan data sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah serta masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan lainnya.